



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS DALAM  
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister

**Disusun oleh :**

**PARINEM**

**211003631010546**

**Program Studi : Magister Administrasi Publik**

**Konsentrasi : Publik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG**

**2023**

LEMBAR PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ZONA INTEGRITAS* DALAM  
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

PARINEM  
211003631010546

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Konsentrasi : Publik

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program

Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Semarang, 26 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Karmanis, M.Si

NIDN. 0605066601

Pembimbing II

Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si

NIDN. 0618056501

Menyetujui,  
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si

NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ZONA INTEGRITAS* DALAM  
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

PARINEM  
211003631010546

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Program Studi  
Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan disahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semarang, 26 Agustus 2023

1. Dr. Karmanis, M.Si  
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Tri Liestari Hadiati, M.Si  
Penguji I
3. Prof Dr. Munawar Noor, M.Si  
Penguji II

Mengesahkan,  
Dekan FISIF UNTAG Semarang



Dr. Rini Werdiningsih, M.Si  
NIDN. 0621105901

## ABSTRAKSI

Kantor Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu dari 16 (enam belas ) Kecamatan di Kota Semarang yang saat ini melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Dalam rencana Pelayanan yang Bersih pada kantor Pemerintah dan Pelayanan kawasan yang Bersih dengan Reformasi Birokrasi, khususnya terkait pencegahan korupsi dan Peningkatan kapasitas pelayanan publik yang Berlandaskan Pedoman Pembangunan zona Integritas Sebagai kawasan yang Bebas Korupsi dan Birokrasi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara no 90 tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Mendeskripsikan dan Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Metode analisis yang dipergunakan adalah Tahap **reduksi** dan Tahap penyajian data. Tahap kesimpulan/verifikasi Penarikan diartikan sebagai penggambaran makna dari data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentunya sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi Implementasi Kebijakan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan cara memberikan sosialisasi tidak secara langsung akan tetapi pada saat pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin bahwa Zona Integritas dalam mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat memahamkan kepada masyarakat bahwa semua pelayanan gratis. Sumber Daya personilnya sudah mencukupi dengan dibantu oleh 5 Kepala Seksi, Petugas Pelayanan. Kemampuan Implementor dalam pelaksanaannya sudah mampu melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan prosedur. Disposisi/Sikap Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 Struktur Birokrasi di Kecamatan Banyumanik adalah yang paling utamanya disiplin aparaturnya, Kejujuran aparaturnya, budaya kerja yang loyal dan mempunyai sifat demokratis yang tinggi. SOP program transformasi kebijakan dalam untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

**Kata Kunci** : Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Publik, Teori Kebijakan Publik.